

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dipengaruhi oleh dinamika dan kontribusi nyata sektor perbankan (Levine, 1997:721). Perbankan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja melalui penyediaan sejumlah dana investasi dan modal kerja bagi dunia usaha (Siamat, 2005: 1-2).

Menurut Alamsyah dkk. (2005), peranan bank di Indonesia adalah sumber pembiayaan untuk mendorong kegiatan perekonomian. Sektor perbankan yang tidak berkembang dengan baik akan menyebabkan perekonomian mengalami hambatan likuiditas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa bank bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi utama bank secara lebih spesifik adalah *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services* (Budisantoso dan Triandaru, 2006). Ketiga fungsi bank tersebut memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fungsi bank dalam perekonomian.

1. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa tabungannya akan dikelola dengan baik oleh bank. Pihak bank sendiri mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur dengan unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik dan mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo (Budisantoso dan Triandaru, 2006).

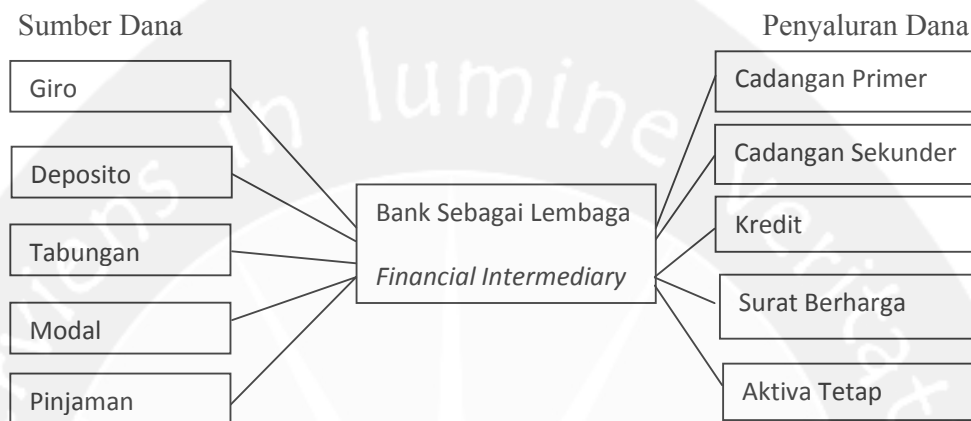
2. *Agent of Development*

Sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua sektor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak didukung sektor moneter. Penghimpunan dan penyaluran dana perbankan sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa (Budisantoso dan Triandaru, 2006).

3. *Agent of Services*

Bank menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan ini berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara lain adalah jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan (Budisantoso dan Triandaru, 2006).

Sumber dana dan penggunaan dana bank melalui pendekatan *Pool of Funds* adalah sebagai berikut (Budisantoso dan Triandaru, 2006):



Gambar 1.1
Sumber Dana dan Penyaluran Dana Perbankan
Sumber: Budisantoso dan Triandaru (2006: 109)

Ada tiga karakteristik operasi perbankan menurut Warjiyo (2006: 431). Pertama, bank adalah lembaga kepercayaan untuk penyimpanan dana masyarakat. Dana masyarakat dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari giro, deposito dan tabungan. Perbankan mempermudah transaksi keuangan dan ekonomi menjadi lebih cepat, aman dan efisien baik dengan pembayaran uang tunai maupun melalui jasa kliring dan kartu elektronik.

Kedua, bank memobilisasi simpanan masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha. Dana yang dihimpun oleh bank tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Hal ini dilakukan karena fungsi bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank

memperoleh pendapatan yang diperoleh dari suku bunga kredit (Warjiyo, 2006: 432).

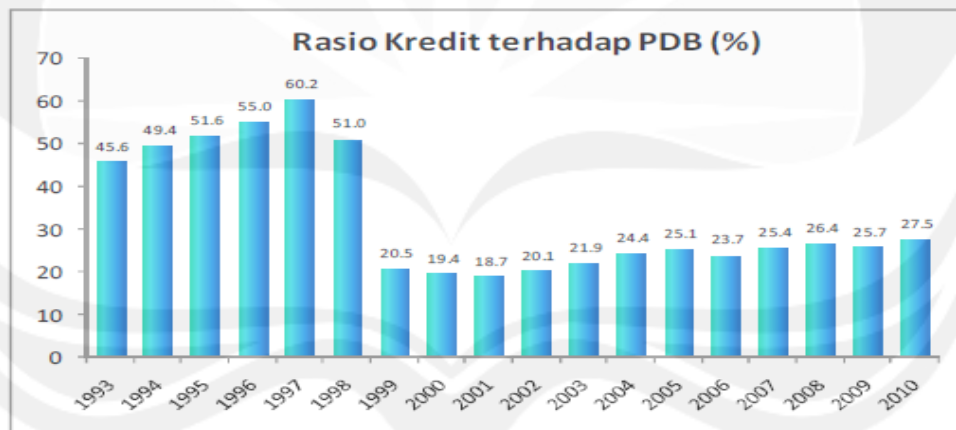
Ketiga, bank adalah lembaga pengembangan pasar keuangan baik pasar uang domestik maupun valuta asing. Sebagai lembaga penanaman aset finansial, bank mentransformasi simpanan masyarakat ke dalam bentuk kredit dan surat-surat berharga (Surat Utang Negara (SUN), Pasar Uang Antara Bank (PUAB) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)) (Warjiyo, 2006: 432).

Ketiga fungsi penting di atas menempatkan peran khusus perbankan dalam sistem ekonomi dan keuangan baik dari perspektif mikro maupun makro. Dari perspektif mikro, keberadaan perbankan diperlukan masyarakat untuk menyimpan dana, memperoleh kredit dan melakukan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, keamanan dan kesehatan bank secara individual dijaga dan dipelihara. Dari perspektif makro, keberadaan dan stabilitas perbankan secara industri ataupun sistem diperlukan sebagai tempat pembayaran. Selain itu, bank mendorong efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter dan efisiensi alokasi sumber dana di dalam ekonomi (Warjiyo, 2006: 432-433). Hal senada diungkapkan oleh Budisantoso dan Triandaru (2006).

Krisis moneter dan ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997 memberikan gambaran nyata bahwa peran strategis sektor perbankan adalah suatu keniscayaan. Salah satu permasalahan utama perbankan pada saat itu adalah masalah likuiditas. Beberapa bank dilikuidasi oleh pemerintah akibat pengelolaan likuiditas yang buruk. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah kredit bermasalah sehingga berimplikasi pada ketidakmampuan bank untuk memenuhi

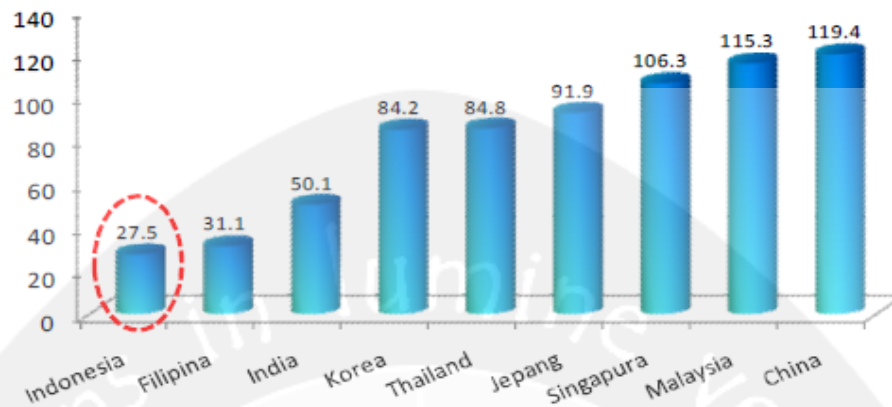
penarikan dana dari nasabahnya (Siamat, 2005:80). Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit perbankan semakin menurun (Agung dkk, 2001).

Banyak pihak menuding lambatnya penyaluran kredit perbankan di Indonesia setelah krisis 1997 merupakan salah satu penyebab lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara Asia lainnya yang terkena krisis (Harmanta dan Ekananda, 2005:52). Alamsyah (2012) menjelaskan rasio kredit terhadap pertumbuhan ekonomi paska krisis moneter tahun 1998 masih di bawah rasio pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum krisis moneter tahun 1998.



Gambar 2.1.
Rasio Kredit terhadap PDB Tahun 1993-2010
Sumber: Alamsyah (2012)

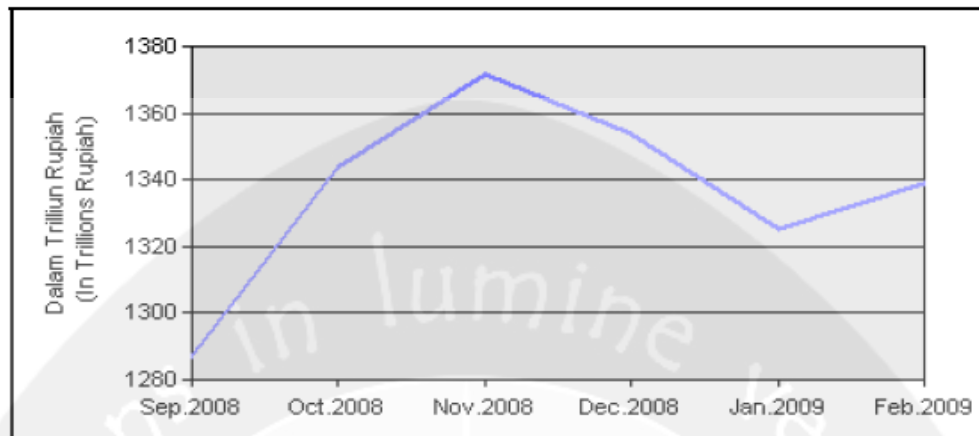
Alamsyah (2012) juga menjelaskan bahwa peran sektor keuangan, khususnya perbankan dalam perekonomian di Indonesia jauh tertinggal dari negara satu kawasan. Negara kawasan yang dimaksud adalah Filipina, India, Korea, Thailand, Jepang, Singapura, Malaysia dan China.



Gambar 3.1.
Perbandingan Rasio Kredit terhadap PDB
Sumber: Alamsyah (2012)

Potensi untuk meningkatkan peran kredit perbankan dalam pembiayaan perekonomian untuk mengejar ketertinggalan dengan negara satu kawasan sangat besar karena perbankan dalam kondisi eksekusi likuiditas. Sektor keuangan khususnya perbankan memegang peran penting untuk memajukan perekonomian nasional (Alamsyah, 2012).

Perekonomian Indonesia awal tahun 2009 yang lambat disebabkan oleh krisis finansial global tahun 2008 – 2009. Krisis finansial global ini berpengaruh pada penurunan ekspansi kredit perbankan pada periode Desember 2008 hingga Januari 2009. Jumlah kredit pada bulan November 2008 yang mencapai 1371,90 Triliun Rupiah mengalami penurunan pada bulan Desember 2008 dan Januari 2009 berturut-turut menjadi 1353,60 Triliun Rupiah dan 1325,30 Triliun Rupiah (Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 7, No. 12, November 2009).



Gambar 4.1

Penurunan Kredit Perbankan Periode Desember 2008 - Januari 2009

Sumber: Statistik Perbankan Berbagai Edisi

Pada awal tahun 2009, perbankan nasional menjaga likuiditas yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan dan permodalan yang cukup untuk mengantisipasi resiko. Perbankan lebih memilih menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) daripada meminjamkannya kepada bank lain atau melakukan ekspansi kredit kepada debitur (Pratama, 2010: 13).

Alamsyah (2012) menjelaskan bahwa faktor fundamental ekonomi dan sektor keuangan domestik yang solid mampu meredam dampak pelemahan ekonomi yang disebabkan krisis finansial global bahkan Indonesia kembali meraih predikat 'Investment Grade'. Di tengah aliran deras modal asing yang masuk ke Indonesia, sektor keuangan khususnya perbankan tetap solid dan berkinerja baik. Aliran modal asing ini dapat menjadi modal untuk meningkatkan secara kesinambungan peran sektor keuangan dalam perekonomian. Namun, peran sektor keuangan khususnya perbankan dalam perekonomian dinilai belum optimal.

Secara umum, bank-bank yang beroperasi di Indonesia saat ini digolongkan dalam dua bagian, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank-bank umum terdiri dari Bank Persero, Bank Swasta Nasional Devisa, Bank Swasta Nasional Non-Devisa, Bank Asing dan Bank Campuran (Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, 2012: 88).

Bank Persero adalah bank-bank pemerintah, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank milik pemerintah yang dicatat dalam Statistik Perbankan Indonesia tahun 2012 sebagai Bank Persero adalah PT Bank Mandiri, Tbk., PT Bank Negara Indonesia, Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. dan PT Bank Tabungan Negara, Tbk. (Bank Indonesia, 2012). PT Bank Mutiara, Tbk. dan PT Bank Agroniaga, Tbk. belum tercatat sebagai Bank Persero dalam Statistik Perbankan Indonesia tahun 2012 (Statistik Perbankan Indonesia-Vol. 10, No. 7, Juni 2012).

Bank pemerintah merupakan bank yang memiliki tingkat penyaluran kredit yang tinggi. Dari tahun ke tahun, total kredit yang diberikan bank pemerintah selalu meningkat. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 2.1 di bawah. Meskipun pertumbuhan kredit Bank Persero selalu meningkat setiap tahun, *Loan to Debt Ratio* (LDR) Bank Persero masih berada di bawah harapan Bank Indonesia (85-110%). Semakin besar kredit yang disalurkan oleh bank, pendapatan bank juga semakin bertambah. Di pihak masyarakat, pertumbuhan kredit berperan penting dalam mencukupi kebutuhan modal dalam membiayai kegiatan operasional. Dengan bergeraknya usaha masyarakat, roda perekonomian akan bergerak menuju masyarakat yang sejahtera. Sedang bagi Bank sendiri kredit

berperan dalam meningkatkan profit atau laba bank, dengan kata lain pendapatan bank akan meningkat bila didukung peningkatan pertumbuhan kreditnya.

Agenor (2000) dalam studi literturnya menyebutkan bahwa sebab-sebab menurunnya penyaluran kredit perbankan kepada sektor swasta di Asia setelah krisis tahun 1997 masih menimbulkan perdebatan di antara para ekonom. Sebagian ekonom berpendapat bahwa menurunnya penyaluran kredit perbankan disebabkan oleh "*credit crunch*" yang menimbulkan fenomena *credit rationing* sehingga terjadi penurunan penawaran kredit oleh perbankan (*supply side constraint*).

Menurut Warjiyo (2006: 435), dalam kenyataannya perilaku penawaran kredit perbankan tidak hanya dipengaruhi oleh dana yang tersedia yang bersumber dari DPK (Dana Pihak Ketiga), tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan atau *CAR (Capital Adequacy Ratio)*, jumlah kredit macet atau *NPLs (Non Performing Loans)*, dan *LDR (Loan to Deposit Ratio)*. Selain itu, Suseno dan Piter A. (2003) menambahkan bahwa indikator lain yang juga berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada debitur adalah faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return on Assets (ROA)*.

Di samping faktor suku bunga, prospek ekonomi, dan kondisi internal, perilaku penawaran kredit bank akan dipengaruhi pula oleh struktur pasar kredit tempat bank beroperasi. Hal ini disebabkan struktur pasar tersebut yang akan menentukan perilaku bank dalam maksimisasi laba dan perilakunya dalam

penawaran kredit. Dengan demikian, perilaku penawaran kredit dalam pasar persaingan sempurna, yang di dalamnya bank tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi suku bunga kredit akan berbeda dengan perilaku bank dalam pasar *monopolistic competition* maupun pasar oligopoli (Model Monti-Klein, 1972 dalam Nuryakin dan Warjiyo, 2006: 26). Selain itu, salah satu karakteristik spesifik dari industri perbankan, yaitu informasi asimetris juga akan berpengaruh pada perilaku bank dalam penawaran kredit. Dalam banyak hal, kondisi yang terakhir ini sering menimbulkan ketidakseimbangan dalam pasar kredit perbankan (*credit rationing*). Namun, literatur yang spesifik menganalisis perilaku perbankan di Indonesia dalam pasar kredit masih sangat sedikit. Padahal telah disebutkan diatas, perilaku sebuah bank untuk menentukan output (kredit) tidak akan terlepas dari jenis pasar tempat bank tersebut beroperasi (Nuryakin dan Warjiyo, 2006:26).

Menurut Nuryakin dan Warjiyo (2006:26) struktur pasar kredit di Indonesia sebenarnya sangat dinamis. Sebelum Paket Kebijakan 1988, Bank Persero merupakan jalur utama pasar kredit perbankan di Indonesia. Namun setelah Paket Kebijakan tersebut diberlakukan, secara gradual Bank Swasta mengambil alih share pasar kredit dari Bank Persero, hingga akhirnya pada tahun 1994 Bank Swasta telah mendominasi pasar kredit. *Share* dari Bank Persero menurun dari 72% pada tahun 1982 sampai hanya 42% pada tahun 1994. *Share* dari Bank Swasta meningkat dari 12% menjadi 45% pada rentang waktu yang sama. Kecenderungan ini terus terjadi sampai krisis melanda tahun 1997/1998.

Krisis ekonomi tahun 1997/1998 telah menghancurkan sektor perbankan di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pada bulan Januari 1998 pemerintah

membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tugas utamanya membantu pemerintah dalam program restrukturisasi dan rekapitalisasi sektor perbankan. BPPN sejak saat itu telah menutup, melakukan merger atau mengambil alih bank dengan jumlah yang cukup signifikan. Sampai Maret 2000, total 65 Bank Swasta dari sekitar 160 bank telah dibekukan dan empat dari tujuh Bank Persero telah di-*merger* menjadi satu bank besar, yaitu Bank Mandiri.

Jumlah bank umum di Indonesia saat ini berjumlah 120 bank. Walaupun begitu, sifat industri perbankan masih sangat terkonsentrasi. Dengan jumlah hanya empat bank, lebih dari 35% Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum berada di Bank Persero pada periode 2008:1-2012:6. DPK adalah sumber kapasitas kredit terbesar dalam bisnis perbankan.

Tabel 1.1
DPK Bank Persero

Jenis Bank	DPK				
	Des2008	Des2009	Des2010	Des2011	Jun2012
Bank Persero					
Dalam miliar rupiah	669,827	783,384	898,405	1,039,257	1.048.512
Dalam Persentase	38,20%	39,70%	38,41%	37,31%	35,47%
Bank Umum					
Dalam miliar rupiah	1,753,292	1,973,042	2,338,824	2,784,912	2.955.833

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 10, No. 7, Juni 2012

Berdasarkan DPK yang ditampung, kinerja Bank Persero patut dibanggakan. Bank Persero dipercayai oleh masyarakat sebagai tempat untuk berinvestasi dalam bentuk deposito. Akan tetapi, berdasarkan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, fungsi intermediasi Bank Persero belum optimal. Hal ini dapat

dilihat dalam Tabel 1.2 di bawah ini. Tabel 1.2 ini menggambarkan perbandingan *LDR* Bank Persero terhadap bank-bank umum lainnya.

Tabel 2.1
Perbandingan *LDR* Bank Umum

Tahun	Des2004	Des2006	Des2008	Des2010	Des2011	Juni2012
Bank Persero	49,90%	59,93%	70,27%	71,54%	74,75%	81,51%
BUSN Devisa	46,23%	60,03%	74,72%	73,16%	78,16%	82,35%
BUSN Non Devisa	68,74%	78,26%	81,66%	79,11%	79,85%	82,64%
BPD	53,39%	55,96%	96,39%	78,26%	74,74%	64,07%
Bank Campuran	75,56%	113,66%	98,63%	100,61%	108,03%	113,20%
Bank Asing	51,25%	79,56%	88,31%	90,86%	96,47%	104,96%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 10, No. 7, Juni 2012

LDR merupakan indikator dalam pengukuran fungsi intermediasi perbankan di Indonesia. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, *LDR* dihitung dari pembagian kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dengan DPK yang mencakup giro, tabungan, dan deposito. Semakin tinggi *LDR*, semakin besar pula DPK yang dipergunakan untuk penyaluran kredit (Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, 2012: 33).

Permodalan bank bertujuan untuk memperlancar operasional sebuah bank. Berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2001, setiap bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang diprosikan dengan rasio *CAR*. *CAR* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri bank dan dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana

masyarakat, pinjaman, dan sebagainya. Besarnya nilai *CAR* memungkinkan bank untuk melakukan penawaran kredit (Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, 2012: 25).

Suatu bank yang sehat harus mampu memenuhi likuiditas (*LDR*) yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk menyediakan dana likuid atau *cash money*. Untuk menjaga keberlangsungan kegiatan operasionalnya, bank harus menjaga likuiditas yang dimiliki agar bank dapat menyediakan dana jika sewaktu-waktu nasabah menarik dananya kembali. Tingkat kepercayaan nasabah kepada bank tidak akan berkurang dan tetap mempercayakan dananya untuk dititipkan di bank tersebut (Triasdini, 2010: 3).

Agung dkk (2001) menjelaskan hasil penelitiannya bahwa terganggunya pertumbuhan kredit perbankan disebabkan penurunan keinginan bank untuk memberikan kredit. Faktor-faktor internal bank adalah rendahnya kualitas aset perbankan, kecukupan *loanable fund*, tingginya *Non-Performing Loans (NPLs)* dan anjloknya modal perbankan akibat depresiasi *Net Interest Margin*.

Penyaluran kredit Bank Persero yang belum optimal mencerminkan perputaran dana di sektor perbankan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber pembiayaan investasi dan produksi bagi sektor riil. Aliran dana yang ditujukan untuk membiayai kegiatan investasi dan produksi seharusnya dijadikan prioritas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Laporan Bank Indonesia (2003) pun menyebutkan bahwa belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan tersebut antara lain disebabkan oleh masih berlangsungnya konsolidasi internal perbankan dan belum mampunya sektor riil

menyerap kredit. Dari sisi kebijakan moneter, terjadinya *credit crunch* karena perbankan enggan menyalurkan kredit menyebabkan kebijakan moneter yang relatif longgar tidak dapat ditransmisikan ke sektor riil melalui pemberian pinjaman. Selain itu, *credit crunch* juga dapat mengurangi ruang gerak bagi kebijakan moneter karena dalam kondisi yang demikian, kebijakan moneter yang menaikkan suku bunga akan memperparah kondisi dunia usaha (Agenor, 2000).

Keengganan perbankan untuk menyalurkan kredit tersebut tentu akan berimbas pada sektor mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Persoalan permodalan menjadi kendala dalam pengembangan eksekutif usaha. Struktur permodalan yang bersumber dari kredit perbankan menjadi sangat penting bagi pengembangan usaha di Indonesia. Namun, bila penyaluran kredit perbankan terus menurun, bukan tidak mungkin bila usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan terhambat (Meydianawathi, 2007: 136).

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini mengkaji pengaruh beberapa variabel terhadap perilaku penawaran Kredit Modal Kerja Bank Persero di Indonesia. Penyaluran kredit perbankan di Indonesia sangat berperan penting untuk pengembangan dunia usaha di Indonesia.

Analisis dilakukan terhadap Kredit Modal Kerja yang disalurkan Bank Persero. Bank Persero adalah penggerak dalam penyaluran kredit perbankan. Bank Persero mempunyai tanggung jawab yang utama dalam pembiayaan untuk pengembangan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, dalam studi ini, ada dua permasalahan yang hendak dikaji.

Permasalahan pertama dalam penelitian ini adalah fenomena gap yang dapat dilihat pada Tabel 2.1. *Loan to Deposit Ratio (LDR)* Bank Persero masih berkisar pada angka 49,90% - 81,75% selama Januari 2004-Juni 2012 yang masih berada di bawah harapan Bank Indonesia (85%-110%). Hal ini menunjukkan belum optimalnya penyaluran kredit. Sumber utama pembiayaan investasi di negara berkembang termasuk di Indonesia umumnya masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan sehingga wajar bila banyak pihak menuding bahwa lambatnya penyaluran kredit perbankan di Indonesia setelah krisis 1997 merupakan salah satu penyebab lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara Asia lainnya yang terkena krisis (Harmanta dan Ekananda, 2005:52).

Kondisi makroekonomi dalam beberapa tahun terakhir semakin membaik. Hal ini tercermin dari terkendalinya laju inflasi, stabilnya nilai tukar, dan turunnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Namun kredit yang disalurkan perbankan belum cukup menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi untuk kembali pada level sebelum krisis. Ini berarti bahwa fungsi intermediasi perbankan di Indonesia masih belum pulih.

Permasalahan kedua adalah ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu (*research gap*). Penelitian terdahulu mengenai pengaruh DPK terhadap kredit dilakukan oleh Krisma Bayu (2006), Meydianawathi (2007) dan Tatik Setiyati (2004). Penelitian Krisma Bayu (2006) dengan sampel bank milik pemerintah menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume kredit bank milik pemerintah. Penelitian Meydianawathi (2007) dengan sampel

bank umum menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja bank umum. Penelitian Bank Indonesia Ambon (2007) dengan sampel seluruh Bank Umum dan BPR yang berada di Ambon menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan. Akan tetapi, penelitian Tatik setiyati (2007) dengan sampel Bank Umum menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Penelitian Septy Andriani (2008) juga menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit kepada sektor UMKM di Indonesia. Terjadi hasil penelitian yang tidak konsisten antara penelitian yang dilakukan oleh Krisma Bayu (2006), Meydianawathi (2007), Tatik Setiyati (2004) dan Septy Andriani (2008).

Perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *CAR* terhadap volume kredit juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Watiek Nyamiati (2009), Indah Lestari (2007), Meydianawathi (2007), Fransiska dan Hasan Sakti Siregar (2006). Pada penelitian Watiek Nyamiati (2009) dengan sampel Bank Umum Swasta Nasional Devisa menunjukkan bahwa *CAR* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kredit. Hasil berbeda ditemukan pada penelitian Indah Lestari (2007) dan Pratama (2010) dengan sampel Bank Umum menunjukkan bahwa *CAR* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan bank umum. Akan tetapi, hasil penelitian Meydianawathi (2007) menunjukkan *CAR* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan modal kerja bank umum.

Penelitian Fransiska dan Hasan Sakti Siregar (2006) dengan sampel Bank Umum justru menunjukkan bahwa *CAR* tidak dapat digunakan untuk memprediksi volume kredit karena hasil uji parsial menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara *CAR* dengan volume kredit. Terjadi hasil penelitian yang tidak konsisten antara penelitian yang dilakukan oleh Watiek Nyamiati (2009), Indah Lestari (2007), Meydianawathi (2007), Fransiska dan Hasan Sakti Siregar (2006) serta Pratama (2010).

Non Performing Loans (NPLs) menurut Soedarto (2004) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit perbankan. Menurut Agung dkk. (2001), Harmanta dan Ekananda (2005), Budiawan (2008), Wikutama (2010) dan Pratama (2010), *Non Performing Loans (NPLs)* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit perbankan. Akan tetapi, menurut Warjiyo dan Nuryakin (2006), *Non Performing Loans (NPLs)* berpengaruh positif terhadap penyaluran Kredit Modal Kerja Kredit Investasi Bank Persero.

Untuk mengakomodasi hal ini, pendekatan yang digunakan merupakan salah satu pilar dalam teori mikroekonomi perbankan yang disebut *Industrial Organization Approach*. Penelitian ini tidak membatasi dan menganggap sektor perbankan sebagai suatu agregat yang pasif melainkan memakai pendekatan organisasi industri. Pendekatan ini memodelkan bank yang bereaksi secara optimal terhadap lingkungannya, termasuk pangsa pasar tempat bank beroperasi. Reaksi optimal bank terhadap lingkungannya ini dapat tercermin dengan perilaku maksimalisasi laba ataupun minimalisasi biaya. Dengan pemikiran demikian, perilaku penawaran kredit bank tidak hanya dipengaruhi oleh variabel-variabel

seperti suku bunga, prospek ekonomi dan kondisi internal bank, tetapi juga oleh perilaku bank untuk meningkatkan laba sesuai dengan karakteristik struktur pasar tempat bank beroperasi.

Nuryakin dan Warjiyo (2006:24) mengakui bahwa Bank Persero seringkali dianggap tidak mampu bereaksi optimal oleh karena keterlibatannya dalam pembiayaan pemerintah atau keterlibatannya dalam pembiayaan kepada Badan Usaha Milik Negara yang berkinerja rendah. Jika bank memang sebagai suatu entitas yang bebas, pembiayaan seperti ini tentu saja seharusnya tidak dilakukan. Hal yang sama juga terjadi dalam penyaluran kredit, Paket Kebijakan 1990 mewajibkan setiap Bank Persero dan Swasta memberikan alokasi 20% dari total kreditnya dalam bentuk kredit usaha kecil (KUK).

Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, tingkat kecukupan modal (*CAR*), *NPLs* dan pangsa pasar (*MS*) merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan Kredit Modal Kerja Bank Persero. Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas merupakan hasil penelitian yang menarik untuk diuji kembali yang dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, yakni mengenai pengaruh *CAR*, *DPK*, *NPLs* dan pangsa pasar (*MS*). Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berjudul: “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, *CAR*, *NPLs* dan *Market Share* terhadap Pertumbuhan Kredit Modal Kerja dengan Model *Vector Error Correction* (Studi pada Bank Persero 2004:1-2012:6)”.

B. Perumusan Masalah

Sumber utama pembiayaan modal kerja di negara berkembang termasuk di Indonesia umumnya masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan sehingga wajar bila banyak pihak menuding lambatnya penyaluran kredit perbankan di Indonesia setelah krisis 1997 merupakan salah satu penyebab lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara Asia lainnya yang terkena krisis (Harmanta dan Ekananda, 2005:52).

Membaiknya kondisi makroekonomi dalam beberapa tahun terakhir yang tercermin dari terkendalinya laju inflasi, stabilnya nilai tukar, dan turunnya suku bunga, namun kredit yang disalurkan perbankan belum cukup menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi untuk kembali pada level sebelum krisis. Ini berarti bahwa fungsi intermediasi perbankan di Indonesia masih belum pulih.

Agenor (2000) dalam studinya menyebutkan bahwa sebab-sebab menurunnya penyaluran kredit perbankan kepada sektor swasta di Asia setelah krisis tahun 1997 masih menimbulkan perdebatan di antara para ekonom. Sebagian ekonom berpendapat bahwa menurunnya penyaluran kredit perbankan disebabkan oleh "*credit crunch*" yang menimbulkan fenomena *credit rationing* sehingga terjadi penurunan penawaran kredit oleh perbankan (*supply side constraint*).

Penyaluran kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah

kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. Melalui fungsi ini, bank berperan sebagai *Agent of Development* (Susilo, Triandaru, dan Santoso, 2006).

Bank Persero dijadikan sebagai subyek penelitian karena *Loan to Deposit Ratio (LDR)* Bank Persero masih berada di bawah harapan Bank Indonesia (85% - 110%). Padahal, ada 35-39% (DPK) Bank Umum berada di Bank Persero. Selain itu, beberapa hasil penelitian terdahulu sebagaimana dikemukakan di atas mempunyai hasil yang berbeda, sehingga terjadi *research gap* antara *CAR*, *NPLs*, DPK dan *Market Share (MS)* terhadap pertumbuhan kredit. *Research Gap* tersebut juga menjadi alasan untuk menelaah kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Kredit Modal Kerja Bank Persero.

Berdasarkan uraian masalah yang telah disampaikan dalam latar belakang, rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh pertumbuhan DPK terhadap pertumbuhan Kredit Modal Kerja Bank Persero?
- b. Bagaimana pengaruh *CAR* terhadap pertumbuhan Kredit Modal Kerja Bank Persero?
- c. Bagaimana pengaruh *NPLs* terhadap pertumbuhan Kredit Modal Kerja Bank Persero?
- d. Bagaimana pengaruh *Market Share (MS)* terhadap pertumbuhan Kredit Modal Kerja Bank Persero?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh pertumbuhan DPK terhadap pertumbuhan Kredit Modal Kerja Bank Persero.
- b. Menganalisis pengaruh *CAR* terhadap pertumbuhan Kredit Modal Kerja Bank Persero.
- c. Menganalisis pengaruh *NPLs* terhadap pertumbuhan Kredit Modal Kerja Bank Persero.
- d. Menganalisis pengaruh *Market Share* terhadap pertumbuhan Kredit Modal Kerja Bank Persero.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Manajerial

Penelitian ini dapat menjadi sarana bahan referensi bagi pembuat kebijakan moneter untuk menstimulus penyaluran kredit di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi dunia perbankan dalam kaitannya dengan fungsi intermediasi perbankan serta kemampuan preventif terhadap perubahan berbagai faktor sehingga penyaluran kredit kepada masyarakat tidak terhambat.

2. Manfaat Akademik

Penelitian ini juga menambah wawasan dan pemahaman tentang manajemen perkreditan perbankan dan kebijakan moneter yang mempengaruhi perkreditan

perbankan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pembandingan hasil riset penelitian dan bahan referensi bagi pembaca dan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Ruang Lingkup Studi

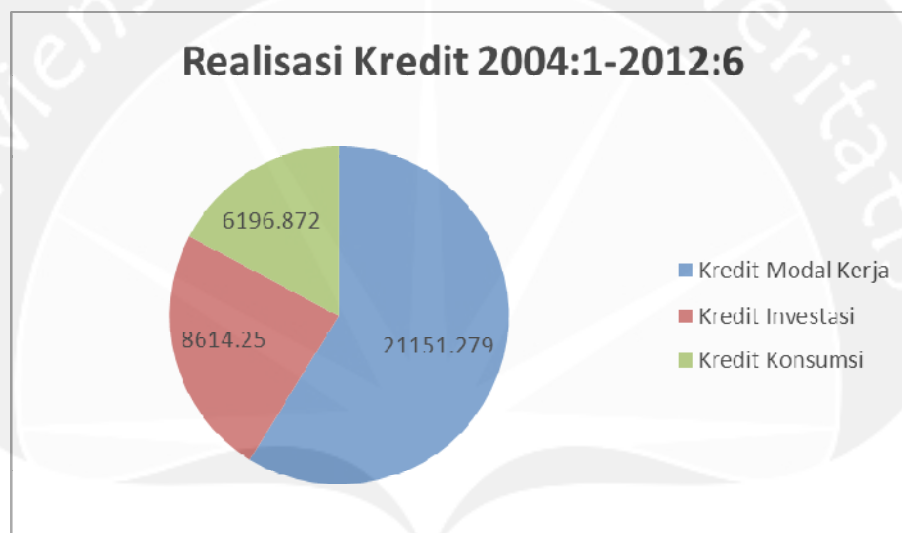
Setiap bank adalah lembaga intermediasi untuk menampung dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Menurut Statistik Perbankan Indonesia edisi Juni 2012, Bank Umum di Indonesia terdiri atas 124 bank. Selain itu, di Indonesia juga terdapat lembaga intermediasi keuangan, seperti Bank Perkreditan Rakyat dan Koperasi. Lembaga-lembaga intermediasi ini juga menampung dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk dan cara yang berbeda. Peraturan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga intermediasi ini juga dibedakan dengan Bank Umum.

Peranan lembaga-lembaga intermediasi selain Bank Umum di atas besar pengaruhnya bagi pertumbuhan jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Namun penelitian ini akan mengkaji secara khusus peranan Bank Persero sebagai lembaga intermediasi keuangan pemerintah dan masyarakat untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat secara luas.

Penelitian ini akan dibatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kredit modal kerja yang disalurkan Bank Persero selama periode Januari 2004 – Juni 2012. Pemerintah Indonesia memiliki sebagian besar saham di PT Bank Mutiara, Tbk. dan PT Bank Agroniaga, Tbk. Bank Indonesia menggolongkan PT Bank Mutiara, Tbk. dan PT Bank Agroniaga, Tbk. ke dalam Bank Umum Swasta

Nasional Devisa (BUSN Devisa) (Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum Konvensional, Bank Indonesia, 2012).

Alasan pemilihan Kredit Modal Kerja adalah peran modal kerja sangat besar bagi industri dan perusahaan untuk menjalankan usahanya. Peningkatan hasil produksi industri dapat meningkatkan investasi dan konsumsi masyarakat.



Gambar 5.1.
Realisasi Kredit Bank Persero 2004:1-2012:6
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 10, No. 7, Juni 2012

Pemilihan periode penelitian bulan Januari 2004 hingga Juni 2012 bertujuan untuk melihat pertumbuhan jumlah kredit yang disalurkan Bank Persero selama empat tahun sebelum krisis finansial global 2008 hingga bulan Juni 2012. Bank Indonesia (2012) dalam Alamsyah (2012) mengatakan bahwa krisis global masih mempengaruhi sektor keuangan nasional hingga saat ini.

Pertumbuhan jumlah kredit yang disalurkan oleh suatu Bank Persero sangat berkaitan dengan peraturan Bank Indonesia dan pangsa pasar. Kredit yang

disalurkan Bank Persero mempunyai tiga jenis, yakni Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsumsi. Penelitian ini berfokus pada Kredit Modal Kerja secara keseluruhan.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penelitian ini dijabarkan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Bagian pendahuluan merupakan bentuk ringkasan dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran umum permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori dan hipotesis. Ketiga hal penting ini merupakan penyempurnaan dan perluasan tesis. Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini mencoba untuk menjawab dan memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

Landasan teori dijabarkan dari tinjauan pustaka dan disusun untuk memecahkan masalah penelitian dan untuk merumuskan hipotesis. Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan

pustaka. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi dan masih akan dibuktikan kebenarannya.

Bab 3 : Metodologi Penelitian

Bab ini membahas mengenai pengidentifikasian variabel-variabel penelitian, penjelasan mengenai cara pengukuran variabel-variabel tersebut dan gambaran populasi dan sampel yang digunakan dalam studi empiris. Selain itu, teknik pemilihan data dan metode analisis data dikemukakan dalam bab ini.

Bab 4 : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian, seluruh proses dan teknik analisis data hingga hasil dari pengujian seluruh hipotesis penelitian sesuai dengan metode yang digunakan.

Bab 5 : Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini menjelaskan keterbatasan dan saran untuk penelitian – penelitian selanjutnya.